



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONI ERRY SAPUTRO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 101367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/245 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000
2. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000
4. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HADIAH Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 2225 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HADIAH Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/86 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 905.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/68 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HADIAH Rp. 805.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **420.000.000**



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1973, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA MINIBUS Tahun 1992, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, WARISAN Rp.
325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	709.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.964.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.964.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.